

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat merupakan salah satu tantangan gizi yang dihadapi secara global, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting dianggap sebagai permasalahan serius karena berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit dan kematian, perkembangan otak yang tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik serta gangguan pada pertumbuhan mental balita (Rohaya et al., 2024).

Stunting merupakan manifestasi dari kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang disebabkan oleh akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung secara kronis, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap stunting, antara lain asupan gizi yang tidak memadai pada balita dan ibu hamil serta kurangnya pengetahuan terkait gizi (Susanti & Kristianti, 2024).

Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi selama masa kehamilan dan awal kelahiran balita, serta biasanya baru tampak setelah bayi mencapai usia 2 tahun. Selain itu, stunting juga dapat terjadi akibat infeksi berulang dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Beberapa tanda anak yang mengalami stunting meliputi postur tubuh pendek, berat badan yang rendah untuk usianya, gangguan perkembangan fisik, kognitif, dan motorik, sistem imun yang lemah sehingga mudah terserang penyakit, serta gangguan dalam proses belajar (Oktavia, Editia, & Primadani, 2024).

Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan asupan gizi, peningkatan sanitasi dan kebersihan, serta stimulasi perkembangan. Perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memelihara serta meningkatkan status gizi masyarakat (Haryanto, Purnami, & Purnomo, 2025).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kejadian stunting, salah satunya adalah faktor ibu, seperti status gizi ibu yang buruk selama kehamilan, perawakan ibu yang pendek, serta pola asuh yang kurang baik, khususnya dalam pemberian gizi yang tidak memadai pada makanan yang diberikan kepada balita. Stunting merupakan kondisi pertumbuhan terhambat pada anak usia balita yang ditandai oleh tinggi badan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar usia mereka. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang bersifat kronis atau berulang sejak masa kehamilan hingga mencapai usia dua tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan) (Ningsih, Sutinbuk, & Asmaruddin, 2024).

Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, tetapi juga rentan terhadap keterlambatan perkembangan kognitif, kesulitan dalam proses belajar, serta penurunan produktivitas saat dewasa. Berdasarkan laporan *UNICEF* (2023), stunting memiliki dampak jangka panjang yang meliputi penurunan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan risiko terhadap penyakit kronis, seperti

kelebihan berat badan dan obesitas di masa mendatang (Tristiyanti & Dewi, 2024).

Saat ini, stunting telah menjadi masalah global yang serius di seluruh dunia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi pendek dibandingkan dengan usia, yang ditandai oleh nilai indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) yang berada di bawah -2 standar deviasi (Ramadhani, Sukoco, & Sari, 2023).

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang selama masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Secara luas, stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai status gizi masyarakat, khususnya pada balita. Apabila suatu wilayah memiliki prevalensi stunting yang tinggi, hal ini menunjukkan adanya permasalahan pembangunan secara umum di daerah tersebut, seperti keterbatasan akses air bersih, pendidikan, kesehatan lingkungan, kemiskinan, dan faktor lainnya Binuko & Maulindar, 2023).

Penanggulangan stunting dan gagal tumbuh telah menjadi fokus perhatian pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 7 tahun 2023 Pasal 5, yang menetapkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk penanganan dan pencegahan stunting (Surbakti et al., 2023).

Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik ditujukan pada ibu hamil dan anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sementara intervensi sensitif menasar masyarakat umum melalui kegiatan pembangunan di sektor non-kesehatan (Saniati, 2023).

Berdasarkan definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting merupakan kondisi pertumbuhan yang gagal, ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang jauh di bawah standar berdasarkan usianya. Secara teknis, kondisi ini diukur melalui indeks tinggi badan menurut usia (TB/U) atau panjang badan menurut usia (PB/U) dengan nilai yang kurang dari  $-2$  standar deviasi. Secara sederhana, anak yang mengalami stunting memiliki postur tubuh yang pendek tidak sesuai dengan usia mereka, dan kondisi ini bukan

disebabkan oleh faktor genetik, melainkan akibat masalah gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (Wulandari & Astuti, 2024).

Stunting dapat menghambat perkembangan fisik maupun mental anak serta memberikan dampak negatif terhadap tingkat kecerdasan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas sejak masa balita, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular. Dalam jangka panjang, stunting berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dilatarbelakangi oleh berat lahir rendah. Oleh karena itu, peran pendampingan dan intervensi yang tepat sangat krusial dalam memutus rantai permasalahan stunting serta mencegah dampak lintas generasi.(Novianti et al. 2022)

Salah satu inisiatif percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (2023), prevalensi stunting di Jawa Tengah menurun dari 27,205% pada tahun 2019 menjadi 20,80% pada tahun 2022. Meskipun secara umum terdapat tren penurunan, masih terdapat 17 kabupaten/kota dengan angka stunting di atas

20%, yang dikategorikan sebagai wilayah dengan prevalensi tinggi (zona kuning). Selain itu, pada periode 2019-2022 terlihat kesenjangan yang signifikan antar kabupaten/kota, sehingga penanganan stunting perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi program pemerintah daerah maupun provinsi .(Novianti et al. 2022)

Menurut standar WHO, prevalensi stunting yang dapat diterima adalah di bawah 20%. Namun, target nasional Indonesia menetapkan bahwa prevalensi stunting harus turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 angka stunting masih berada pada kisaran 24,4%, sedangkan pada tahun 2022 tercatat penurunan menjadi 21,1%. Angka ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Novianti et al. 2022)

Untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, diperlukan penurunan sebesar 10,4% dalam waktu tiga tahun, sehingga penurunan tahunan yang dibutuhkan adalah lebih dari 3,13% per tahun. Upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting

dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta lembaga terkait lainnya. Strategi ini merujuk pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan dalam meminimalkan permasalahan stunting di berbagai kecamatan di wilayahnya. (Novianti et al. 2022)

Pada tahun 2024, Kecamatan Adipala masih mengalami kendala signifikan dalam menurunkan angka stunting. Meski pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program intervensi gizi, prevalensi stunting di beberapa desa di Adipala mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga (Lestari & Hidayat, 2023).

Beberapa desa dengan tingkat kasus stunting yang tinggi biasanya mengalami disparitas dalam kualitas sanitasi, praktik hidup bersih dan sehat, serta pola asuh yang kurang optimal. Ditemukan pula balita yang tidak menerima ASI eksklusif selama enam bulan, rendahnya asupan protein hewani dalam konsumsi harian, serta keterlambatan orang tua dalam memantau pertumbuhan anak melalui posyandu. Selain itu, pernikahan pada usia muda dan tingkat pendidikan orang tua yang cenderung rendah juga berkontribusi memperburuk risiko stunting (Sari & Kurniawan, 2024).

Dalam aspek pelayanan publik, kader pembangunan manusia (KPM) dan tenaga kesehatan senantiasa berusaha memberikan pendampingan kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Akan tetapi, kendala seperti keterbatasan jumlah tenaga, cakupan wilayah yang luas, serta komunikasi perubahan perilaku yang belum berjalan secara optimal, menyebabkan upaya percepatan penurunan stunting belum memberikan hasil yang maksimal (Pratiwi & Andriani, 2024).

Program bantuan pangan dan intervensi gizi spesifik yang dijalankan oleh pemerintah juga memerlukan penguatan lebih lanjut agar dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan stunting di Kecamatan Adipala pada tahun 2024 menjadi fokus utama karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan anak saat ini, melainkan juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tanpa adanya penanganan yang terkoordinasi dan kolaboratif, kemungkinan terhambatnya perkembangan kognitif, fisik, serta produktivitas anak-anak di wilayah tersebut akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, KPM, dan sektor swasta guna memastikan setiap anak di Adipala dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan memiliki daya saing (Hidayati & Wahyuni, 2023).

Selain faktor gizi dan pola asuh, kondisi lingkungan juga berperan sebagai penyebab meningkatnya kasus stunting di Kecamatan Adipala. Beberapa desa menghadapi keterbatasan dalam akses air bersih serta praktik buang air besar sembarangan (BABS), yang secara langsung meningkatkan risiko

infeksi pada balita. Infeksi berulang seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi faktor komorbid yang memperburuk status gizi anak, sehingga mereka menjadi rentan terhadap pertumbuhan yang terhambat (Nugraheni & Prasetyo, 2024).

Kompleksitas tantangan ini diperparah oleh pengaruh budaya lokal dan kebiasaan turun-temurun yang memengaruhi cara keluarga dalam merawat anak, termasuk dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang belum memenuhi standar gizi seimbang. Faktor lain yang memperkuat permasalahan stunting di Adipala adalah rendahnya keterlibatan keluarga sasaran dalam program pemerintah. Beberapa keluarga belum secara rutin memanfaatkan layanan posyandu, disebabkan oleh kesibukan, kurangnya dorongan, maupun anggapan bahwa anak tampak sehat meskipun pertumbuhannya belum optimal.

Di beberapa wilayah, fasilitas pendukung seperti rumah desa sehat, dapur sehat atasi stunting (DASHAT), serta program pemberdayaan keluarga belum sepenuhnya dimanfaatkan akibat terbatasnya

informasi yang diterima masyarakat. Dari perspektif kelembagaan, koordinasi antar sektor sejatinya telah berlangsung, namun masih membutuhkan penguatan, terutama dalam menyelaraskan persepsi serta mendistribusikan peran dalam intervensi yang bersifat sensitif.

Beberapa perangkat desa dan kader memandang isu stunting semata-mata sebagai tanggung jawab tenaga kesehatan, padahal faktor penyebabnya jauh lebih kompleks. Kondisi ini menyebabkan program-program terkait, seperti peningkatan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan edukasi tentang pernikahan yang siap hamil, tidak dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, kualitas komunikasi antara KPM dengan keluarga sasaran juga menghadapi hambatan, khususnya dalam menyampaikan pesan perubahan perilaku yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Masalah stunting pada tahun 2024 di Adipala menjadi perhatian utama karena pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting menghadapi risiko kesulitan

dalam proses belajar, konsentrasi yang menurun, serta pencapaian akademik yang tidak optimal.

Dalam kerangka besar pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, stunting merupakan ancaman jangka panjang yang memerlukan penanganan serius dan segera. Oleh sebab itu, kecamatan dan pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat intervensi secara holistik, mulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan peran KPM, hingga penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Diharapkan, dengan adanya kolaborasi serta penerapan strategi komunikasi yang efektif, Kecamatan Adipala mampu mempercepat penurunan stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Peran setiap keluarga harus diperkuat, bukan sekadar sebagai penerima program, melainkan sebagai pelaku utama dalam menjamin tumbuhnya generasi Adipala yang sehat dan berkualitas. (By Dyah Kartika 2024)

Sesuai data yang ada dari puskesmas Adipala 1 pada tahun 2024 balita yang terindikasi stunting

sebanyak 87 dari jumlah balita 3.250 untuk 9 desa berdasarkan pengukuran TB/U, sedangkan jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan pengukuran BB/TB sejumlah 177. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwa di kecamatan Adipala untuk 9 Desa, salah satunya adalah desa buntan, yang mana di desa buntan masih ada balita yang terindikasi stunting sebanyak 3 balita di tahun 2024 dan balita gizi kurang dan balita gizi kurang sebanyak 6 balita. (Kesehatan et al. 2024)

Peran Pemerintah desa dalam menangani pencegahan dan penurunan stunting adalah dengan adanya penganggaran untuk kegiatan penanganan stunting. Yakni dukungan dari kementrian desa PDT dan transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain dengan kegiatan – kegiatan yang menunjang penurunan dan pencegahan stunting dan bisa di lakukan oleh unsur Desa.

Beberapa kegiatannya adalah pemberian makanan tambahan PMT pada balita, perawatan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu juga kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah kegiatan sanitasi dan air bersih serta jambanisasi.

Selain itu juga adanya insentif untuk kader pembangunan manusia yang bertugas menangani pencegahan dan penurunan stunting, pengadaan obat – obatan, vitamin dll.

Dalam penanganan stunting di desa terdapat kader yang menangani secara khusus yaitu kader pembangunan manusia (KPM) yang bertugas membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa, khususnya dalam pencegahan dan penangana stunting di desa.

Hal ini sesuai dengan Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia yang diterbitkan melalui Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018. KPM (Kader Pembangunan Manusia) juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengidentifikasi sasaran, memfasilitasi prioritas penggunaan dana desa dan memastikan layanan yang berkualitas bagi kelompok sasaran, dalam hal ini sasaran keluarga stunting.

Dalam hal ini peran KPM (Kader Pembangunan Manusia) bukan lah hal yang mudah selain

mengidentifikasi sasaran, memfasilitasi juga memastikan penanganan dan pencegahan stunting tepat sasaran juga harus melaporkan konvergensi stunting kepada Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjadi acuan kebijakan di tingkat Desa melalui rembug stunting yang diselenggarakan di tingkat Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul “Strategi komunikasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Terhadap Penurunan Stunting Di Desa Bunton Tahun 2024”. Yaitu strategi komunikasi dan faktor pendukung serta penghambat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi komunikasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) terhadap penurunan stunting di Desa Bunton?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kader Pembangunan Manusia (KPM) terhadap penurunan stunting di desa Bunton?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) terhadap penurunan stunting di Desa Bunton.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kader Pembangunan Manusia (KPM) terhadap penurunan stunting di Desa Bunton

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta memperkaya studi ilmiah di bidang komunikasi penyiaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi dalam masyarakat.
  - b. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan studi serupa pada masa yang akan datang.

- c. Menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan teori komunikasi kesehatan serta strategi komunikasi yang didasarkan pada pendekatan komunitas.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan oleh Kader Pembangunan Manusia dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh Pemerintah Desa dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) dalam merancang program serta kegiatan yang bertujuan mendukung percepatan penurunan stunting.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran komunikasi dalam mendukung perilaku hidup sehat serta upaya pencegahan stunting pada anak.

- d. Penelitian ini memberikan rekomendasi pembelajaran serta pengalaman empiris bagi para peneliti dalam mengkaji strategi komunikasi di sektor kesehatan masyarakat.

## **E. Keaslian Penelitian**

Agar penelitian ini lebih singkat, terarah dan tidak melebar ke dalam hal-hal yang tidak perlu, maka peneliti perlu untuk membatasi masalah terkait area penelitian. Batasan penelitian digunakan untuk mempertimbangkan suatu hal yang perlu atau tidak dicantumkan dalam penelitian. Agar peneliti dapat lebih fokus dan mudah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Maka peneliti meninjau dari judul penelitian sebelumnya yang sudah ada dan sesuai dengan judul penulis. Adapaun peneliti meninjau relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Skripsi Aulia wanda Mufadhdhal (2024)**

Strategi Komunikasi Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Kampar dalam penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data, Legitimasi data, dan metode analisis data, Skripsi Aulia Wanda membahas

tentang Strategi Komunikasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Persamaan dengan peneliti adalah:

Kedua judul tersebut secara tegas menekankan sasaran utama, yakni pengurangan angka stunting. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya termasuk dalam kerangka kerja utama program nasional percepatan penanggulangan stunting di Indonesia. Lebih lanjut, fokus ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terintegrasi lintas sektor.

Program-program tersebut tidak hanya menekankan pentingnya peningkatan status gizi anak, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, kedua hal ini berfokus pada penurunan stunting dan mencerminkan peran strategis dalam upaya nasional menurunkan

prevalensi stunting serta mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Kedua judul ini sama-sama menyoroti pentingnya komunikasi sebagai strategi utama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi dipandang sebagai instrumen yang efektif dalam menyampaikan informasi, memodifikasi perilaku masyarakat, serta meningkatkan kesadaran mengenai stunting.

Selanjutnya, komunikasi memiliki peranan krusial dalam membangun kesepahaman Bersama di antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, sehingga pesan-pesan mengenai pencegahan dan penanganan stunting dapat diterima serta diimplimentasikan secara berkelanjutan.

Melalui strategi komunikasi yang efektif, diharapkan terjadi perubahan perilaku positif dalam praktik pemberian makanan, perawatan anak, serta pola hidup sehat pada tingkat keluarga

dan komunitas. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampain informasi, melainkan juga menjadi pendorong dalam memperkuat komitmen kolektif guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Aktor dilapangan pada kedua judul tersebut sama sebagai ujung tombak dalam pelaksana program penurunan dan pencegahan stunting baik di tingkat desa maupun di tingkat komunitas.

Mereka menempati posisi strategis karean berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami konteks sosial dan budaya setempat, serta memiliki kemampuan untuk mengkonvensi kebijakan dan program pemerintah menjadi tindakan nyata di lapangan.

Peran mereka tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif,advokatif, dan motivasional dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dengan dukungan dan kapasitas yang memadai, para pelaku ini mampu bertindak sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran gizi,

memajukan perilaku hidup sehat, serta menjamin efektifitas dan keberlanjutan intervensi program. Oleh sebab itu, kebersihan program penurunan dan pencegahan stunting sangat tergantung pada pemanfaatan optimal peran serta kolaborasi para pelaku di lapangan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Perbedaan paling mencolok terletak pada subyek yang menjadi di titik perhatian: judul pertama menempatkan Tim Pendamping Penanganan Stunting (TPPS) sebagai pelaksana strategi komunikasi, sementara judul kedua menargetkan fokus pada Kader Pembangunan Manusia (KPM), yang memiliki peran lebih beragam.

Tim Pendamping Penanganan Stunting Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) berfungsi sebagai tim lintas sektor yang mengkoordinasikan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di berbagai tingkat pemerintahan.

Di sisi lain, Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjalankan fungsi yang lebih dekat

dengan masyarakat, bertindak ganda sebagai pendamping keluarga, fasilitasi, fasilitator perubahan perilaku, sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Meskipun keduanya memiliki tujuan sama, yakni mendukung percepatan stunting, pendekatan yang digunakan berbeda. Tim Pendamping Penanganan Stunting (TPPS) lebih menitikberatkan pada aspek koordinasi dan penguatan sistem, sedangkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat serta intervensi langsung di tingkat keluarga. Perbedaan ini justru menunjukkan keterpaduan peran antara kebijakan makro dan tindakan mikro yang saling melengkapi dalam mewujudkan keberhasilan program nasional penanggulangan stunting.

Judul pertama menonjolkan fokus yang lebih terarah dan spesifik pada satu entitas, yaitu Tim Pendamping Penanganan Stunting (TPPS), sebuah tim resmi yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah.

Fokus tersebut mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan berlandaskan regulasi, dimana Tim Pendamping Penanganan Stunting (TPPS) berperan dalam menjamin pelaksanaan strategi komunikasi serta intervensi penurunan stunting sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dengan dukungan landasan kelembagaan yang kuas, Tim Pendamping Penanganan Stunting (TPPS) memiliki kewenangan koordinatif yang memungkinkan terwujudnya sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi mempercepat pencapaian target penurunan stunting. sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi mempercepat pencapaian target penurunan stunting.

Sebaliknya, judul kedua memiliki cakupan yang lebih luas karena KPM melibatkan beragam latar belakang dan peran dalam konteks pembangunan manusia, tidak hanya terbatas pada program penanggulangan stunting, melainkan juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara komprehensif.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) sendiri berasal dari latar belakang dan memiliki fungsi yang bervariasi, mulai dari sebagai fasilitator perubahan perilaku, pendamping keluarga, hingga sebagai penggerak pembangunan berbasis komunitas. Peran yang bersifat fleksibel ini menjadikan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai penghubung krusial antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai dimensi pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2. Skripsi Dhea Jayanti Pratiwi (2023)

Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan metode Lokasi penelitian, Waktu penelitian dan Informan penelitian. Skripsi Dhea Jayanti Pratiwi membahas tentang strategi pencegahan stunting di kecamatan medan timur kota medan. Persamaan dengan peneliti adalah:

Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan penelitian berjudul Strategi Komunikasi Kader Pembangunan

Manusia terhadap Penurunan Stunting di Desa Bunton tahun 2024 memiliki kesamaan tema, yakni upaya penanggulangan stunting.

Kedua studi tersebut menitikberatkan pada strategi atau langkah-langkah yang diambil untuk menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Baik penelitian di Kecamatan Medan Timur maupun di Desa Bunton sama-sama menekankan pentingnya peran berbagai pihak di tingkat lokal dalam mendukung program pemerintah guna menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Persamaannya terdapat pada tujuan yang serupa, yaitu memahami strategi yang efektif dalam penanganan stunting.

Sedangkan perbedaannya adalah, berdasarkan pendekatan dan cakupan penelitian, Skripsi berjudul Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan mengkaji strategi pencegahan stunting secara menyeluruh, meliputi berbagai dimensi kebijakan, program kesehatan, serta peran lintas sektor di lingkungan perkotaan.

Sebaliknya, penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Kader Pembangunan Manusia terhadap Penurunan Stunting di Desa Bunton tahun 2024 lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi yang dilakukan oleh kader pembangunan manusia di tingkat desa, yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya penurunan dan pencegahan stunting. Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dari segi fokus kajian, pendekatan yang digunakan, serta lokasi pelaksanaan penelitian.

Selain itu, judul pertama menitikberatkan pada upaya atau strategi umum yang diterapkan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, puskesmas, dan masyarakat, dalam mencegah terjadinya stunting.

Penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat atau kebijakan publik, dengan mengkaji bagaimana program dan kebijakan dijalankan di tingkat kecamatan perkotaan.

Fokusnya lebih luas, meliputi berbagai aspek seperti sosialisasi gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta koordinasi lintas sektor dalam pencegahan stunting. Sementara itu, judul peneliti memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku guna menurunkan angka stunting.

Pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada bidang komunikasi pembangunan atau komunikasi kesehatan. Selain itu, lokasi penelitian berada di tingkat desa, sehingga konteks sosial, budaya, dan peran masyarakat lokal lebih dominan dibandingkan penelitian yang dilakukan di wilayah perkotaan. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua judul tersebut terletak pada objek kajian, pendekatan penelitian, dan cakupan wilayah.

### 3. Skripsi Apriadi (2023)

Strategi komunikasi Humas dalam mempertahankan citra positif akibat kasus korupsi

APBD di DPRD Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian kredibilitas data.

Penelitian ini membahas strategi komunikasi komunikasi Humas dalam mempertahankan citra positif akibat kasus korupsi APBD di DPRD Sumatra Utara. Persamaannya dengan peneliti adalah:

Kedua judul skripsi tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada fokus utama penelitian, yaitu strategi komunikasi. Keduanya menitikberatkan pada bagaimana suatu pihak memanfaatkan komunikasi secara strategis untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks permasalahan sosial. Pada penelitian pertama, strategi komunikasi diterapkan oleh bagian Humas lembaga pemerintahan guna mempertahankan dan memperbaiki citra lembaga di mata publik setelah terjadinya kasus korupsi.

Sementara itu, pada penelitian kedua, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia bertujuan mengedukasi

masyarakat dalam pencegahan stunting. Meskipun konteksnya berbeda, satu berada di ranah kelembagaan dan yang lain di ranah sosial kemasyarakatan, keduanya sama-sama mengedepankan pentingnya peran komunikasi yang terencana serta persuasif dalam membentuk persepsi serta memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Selain itu, kedua studi tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan akhirnya, yaitu menciptakan citra positif dan membangun kepercayaan publik. Dalam kasus Humas DPRD, citra positif dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, sedangkan dalam konteks Kader Pembangunan Manusia, citra positif berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan kesehatan yang disampaikan, agar program pencegahan stunting dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.

Dengan demikian, persamaan antara kedua topik tersebut terdapat pada pemanfaatan strategi komunikasi sebagai instrumen utama untuk

memengaruhi persepsi publik, baik dalam lingkup kelembagaan maupun pembangunan sosial.

Keduanya menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan juga merupakan proses pembentukan hubungan, kepercayaan, serta perubahan sikap masyarakat terhadap isu yang dihadapi.

Sedangkan perbedaanya Adalah, walaupun kedua judul tersebut sama-sama membahas strategi komunikasi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok terkait tujuan komunikasi, objek penelitian, konteks masalah, serta pendekatan komunikasi yang diterapkan. Judul pertama menitikberatkan pada bagaimana lembaga pemerintah, melalui bagian Hubungan Masyarakat (Humas), mengimplementasikan komunikasi strategis untuk mengelola krisis reputasi serta memulihkan citra publik pasca kasus korupsi.

Fokus utama penelitian ini berorientasi pada komunikasi krisis dan manajemen citra lembaga publik. Tujuannya adalah memahami bagaimana strategi komunikasi dipakai sebagai alat untuk

mempertahankan reputasi lembaga agar tetap dipercaya oleh masyarakat di tengah isu negatif.

Sementara itu, judul kedua lebih mengarah pada komunikasi pembangunan dan komunikasi kesehatan. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada krisis atau citra lembaga, melainkan pada pemberdayaan masyarakat serta penyampaian pesan kesehatan melalui kader di tingkat desa. Sasaran utama penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

Dari segi konteks penelitian mengenai Humas DPRD dilaksanakan di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi, dengan fokus pada penanganan isu negatif dan hubungan dengan media, sementara penelitian tentang Kader Pembangunan Manusia dilakukan di tingkat desa, dengan penekanan pada interaksi langsung dengan masyarakat serta penyuluhan berbasis komunitas.

Perbedaan tersebut juga mencerminkan dua bentuk penerapan strategi komunikasi yang berbeda; satu bersifat reaktif dalam menghadapi krisis, dan

yang lain bersifat proaktif dalam pencegahan masalah kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua judul tersebut terletak pada tujuan komunikasi, yakni judul pertama bertujuan pada pemulihan citra sedangkan judul kedua pada perubahan perilaku masyarakat; objek kajian, di mana judul pertama memfokuskan pada lembaga pemerintah dan judul kedua pada kader masyarakat; serta bidang kajian, yaitu komunikasi krisis pada judul pertama dan komunikasi pembangunan pada judul kedua. Meskipun berbeda konteks, keduanya menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang tepat memiliki peran sentral dalam membangun kepercayaan dan menciptakan perubahan positif di masyarakat

#### 4. Skripsi Akhmad Gozali (2019)

Strategi komunikasi Penyiar radio republik indonesia (RRI) di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data. Skripsi Akhmad Gozali membahas Strategi komunikasi Penyiar radio republik indonesia (RRI) di Bandar Lampung. Persamaan dengan peneliti adalah:

Kedua judul tersebut memiliki kesamaan utama dalam hal fokus kajian, yakni sama-sama membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Baik penyiar RRI di Bandar Lampung maupun Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Bunton memegang peran penting sebagai penyampai informasi (komunikator) yang berusaha memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat melalui pesan yang disampaikan. Dalam konteksnya, penelitian pertama menggunakan strategi komunikasi dengan menjangkau khalayak luas melalui media massa, khususnya radio, bertujuan memberikan informasi, edukasi, serta membangun hubungan positif antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat.

Sementara itu, penelitian tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM) menerapkan strategi komunikasi secara langsung atau tatap muka dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting. Meskipun berbeda media dan konteks, keduanya sama-sama berorientasi pada penyampaian pesan yang efektif agar pesan dapat diterima,

dipahami, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, keduanya menekankan signifikansi kemampuan komunikator dalam merancang pesan, menentukan saluran komunikasi yang sesuai, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik audiens. Baik penyiar radio maupun kader Pembangunan Manusia harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi secara menarik, jelas, dan persuasif agar tujuan komunikasi dapat tercapai.

Oleh karena itu, kesamaan dari kedua judul tersebut berada pada fungsi strategis komunikasi dalam menjalin hubungan antara komunikator dan masyarakat, serta pada tujuan utama komunikasi, yakni menghasilkan pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku yang positif pada masyarakat melalui penerapan strategi komunikasi yang terstruktur dan efektif.

Sedangkan Perbedaanya adalah, meskipun keduanya sama-sama mengkaji strategi komunikasi, kedua judul skripsi tersebut memperlihatkan

perbedaan signifikan dalam hal konteks, tujuan, media komunikasi, serta target audiens.

Judul pertama memusatkan perhatian pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyiar radio sebagai bagian dari institusi media massa. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur khalayak melalui siaran radio. Strategi komunikasi yang diterapkan lebih menekankan pada pengelolaan pesan media, teknik penyiaran, serta pemanfaatan teknologi siaran guna menjangkau audiens yang luas dan beraneka ragam. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini lebih terkait dengan bidang komunikasi massa dan media penyiaran.

Sebaliknya, judul penelitian memiliki konteks yang berbeda, yaitu dalam ranah komunikasi pembangunan dan komunikasi kesehatan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kader di tingkat desa melaksanakan komunikasi interpersonal dan kelompok dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat. Media komunikasi

yang digunakan lebih bersifat langsung (tatap muka) melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, atau pendampingan keluarga. Tujuannya bukan untuk menjangkau khalayak luas, melainkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan gizi keluarga. Selain itu, dari segi lingkup kerja dan sasaran audiens, penyiar RRI berkomunikasi dengan masyarakat umum di wilayah kota melalui media elektronik, sedangkan kader pembangunan manusia melakukan interaksi secara langsung dan personal dengan masyarakat desa.

Penyiar RRI lebih berperan sebagai komunikator profesional di ranah publik, sedangkan kader pembangunan manusia berfungsi sebagai fasilitator sosial di tingkat komunitas. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada media dan pendekatan komunikasi, yaitu yang pertama bersifat massa dan yang kedua interpersonal; bidang kajian, yaitu yang pertama komunikasi media dan yang kedua komunikasi pembangunan; serta tujuan komunikasi, yakni yang pertama penyebaran informasi dan yang kedua perubahan perilaku masyarakat. Meskipun berbeda konteks, keduanya

sepakat bahwa keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada strategi yang diterapkan serta kemampuan komunikator dalam memahami karakteristik audiensnya

5. Skripsi Uli Durrotunnasikhah (2020)

Strategi komunikasi pemasaran obyek wisata madiun umbul square dalam meningkatkan pengunjung pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, dan analisa data. Skripsi Uli Durrotunnisaikhah membahas strategi komunikasi pemasaran obyek wisata madiun umbul square dalam meningkatkan pengunjung pada tahun 2019. Persamaan dengan peneliti adalah :

Kedua judul tersebut memiliki kesamaan utama dalam fokus kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji strategi komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Baik dalam konteks promosi pariwisata maupun dalam upaya pencegahan stunting, keduanya menempatkan komunikasi sebagai proses yang terencana, terarah, dan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku serta membangun hubungan dengan masyarakat. Dalam penelitian

pertama, strategi komunikasi diterapkan dalam bidang pemasaran pariwisata, di mana pengelola Obyek Wisata Madiun Umbul Square menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah pengunjung. Komunikasi berfungsi sebagai media untuk mempengaruhi serta membentuk citra positif destinasi wisata di mata masyarakat.

Dalam penelitian kedua, strategi komunikasi diaplikasikan dalam konteks pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat, di mana Kader Pembangunan Manusia (KPM) berperan dalam menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.

Komunikasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta mengubah perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat. Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fungsi strategis komunikasi dalam membangun pemahaman dan mendorong tindakan positif dari audiens. Baik pengelola wisata maupun kader pembangunan manusia harus menyusun pesan yang efektif, memilih media komunikasi yang sesuai, serta menyesuaikan

gaya komunikasi dengan karakteristik audiens yang dituju. Keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan respons positif dari masyarakat; pada penelitian pertama berupa peningkatan jumlah pengunjung, sedangkan pada penelitian kedua berupa meningkatnya kesadaran dan perilaku sehat dalam mencegah stunting.

Dengan demikian, kedua judul tersebut menunjukkan kesamaan dalam hal pemanfaatan strategi komunikasi untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat, meskipun diterapkan dalam konteks yang berbeda, yaitu sektor pariwisata dan sektor kesehatan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik dalam promosi wisata maupun dalam upaya pembangunan manusia.

Perbedaannya adalah, walaupun kedua judul tersebut sama-sama meneliti tentang strategi komunikasi, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks, tujuan komunikasi, sasaran audiend, serta bidang kajian yang menjadi fokus penelitian.

Judul pertama menitikberatkan pada komunikasi pemasaran yang diaplikasikan untuk mempromosikan serta meningkatkan jumlah pengunjung di sebuah destinasi pariwisata.

Tujuan utama komunikasi dalam studi ini adalah menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengunjungi lokasi tersebut melalui penyusunan pesan promosi yang menarik, pemanfaatan media publikasi, pelaksanaan kegiatan promosi langsung, serta penguatan citra positif destinasi wisata.

Pendekatan yang diterapkan lebih mengarah pada komunikasi bisnis dan pemasaran, di mana keberhasilan strategi diukur berdasarkan peningkatan jumlah pengunjung dan tingkat kepuasan wisatawan.

Sebaliknya, judul penelitian ini difokuskan pada komunikasi pembangunan dan komunikasi kesehatan. Tujuan dari komunikasi tersebut bukan untuk mengejar kepentingan ekonomi, melainkan untuk meningkatkan kesadaran serta mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan gizi anak.

Dalam penelitian ini, Kader Pembangunan Manusia berperan sebagai komunikator sosial yang

melakukan interaksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan edukasi, pendampingan keluarga, dan penyuluhan kesehatan. Media yang digunakan lebih bersifat interpersonal dan kelompok kecil, bukan media promosi massal sebagaimana yang lazim dalam konteks pemasaran pariwisata.

Dari segi konteks dan lingkup, penelitian mengenai Umbul Square berfokus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sasaran utama pengunjung dan wisatawan. Sebaliknya, penelitian terkait kader pembangunan bergerak dalam bidang kesehatan dan pembangunan sosial, dengan target utama keluarga serta masyarakat desa.

Selain itu, strategi komunikasi dalam kasus Umbul Square bersifat komersial dan persuasif guna meningkatkan keuntungan, sedangkan strategi kader bersifat edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pokok antara kedua judul tersebut terletak pada bidang penerapan komunikasi (judul pertama dalam pemasaran, sedangkan yang kedua dalam pembangunan sosial), tujuan komunikasi (yang pertama untuk meningkatkan kunjungan, sedangkan

yang kedua untuk pencegahan stunting), serta pendekatan komunikasi (yang pertama menggunakan media promosi, sementara yang kedua melalui komunikasi tatap muka). Meskipun berbeda konteks, keduanya menegaskan bahwa strategi komunikasi yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan tujuan yang hendak dicapai agar dapat diterima secara optimal

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terkait hasil penelitian, serta mempermudah penyusun dan juga pembaca dalam mencari informasi terkait dengan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Rumusan Masalah
- B. Tujuan Penelitian
- C. Manfaat Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Observasi

H. Dokumentasi

I. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian Komunikasi

B. Kajian Teori Kader Pembangunan Manusia (KPM)

C. Pencegahan Dan Penurunan Stunting

D. Kajian Teori Tentang Desa

## BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C. Sumber data Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisa Data

F. Teknik Kabsahan Data

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Orientasi Kancan

B. Temuan Penelitian

C. Strategi Komunikasi Kpm Terhadap

Penurunan Stunting Di Desa Bunton

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. SARAN

C. KETERBATASAN PENELITIAN

D. Penutup